

**FUNGSI DELIK ADUAN DALAM PENANGANAN PERKARA GENDAK  
ATAU PERSELINGKUHAN YANG DISERTAI PERZINAHAN**

**(Analisis Putusan Nomor Perkara: 210/Pid.B/2015/PN.Skt dan**

**Putusan Nomor Perkara: 64/Pid B/2016/PN.Wng)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata I**

**pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**IRWAN PRABOWO**

**C100130135**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan  
Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

IRWAN PRABOWO

C100130135

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

## HALAMAN PENGESAHAN

### FUNGSI DELIK ADUAN DALAM PENANGANAN PERKARA GENDAK ATAU PERSELINGKUHAN YANG DISERTAI PERZINAHAN

(Analisis Putusan Nomor Perkara: 210/Pid.B/2015/PN.Skt dan  
Putusan Nomor Perkara: 64/Pid B/2016/PN.Wng)

Yang ditulis oleh:

IRWAN PRABOWO

C100130135

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari jumat, tanggal 05 Oktober 2018

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono SH.,M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. M. Iksan SH.,M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.H)

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 Oktober 2018

Yang menyatakan,



**IRWAN PRABOWO**

**FUNGSI DELIK ADUAN DALAM PENANGANAN PERKARA GENDAK  
ATAU PERSELINGKUHAN YANG DISERTAI PERZINAHAN  
(Analisis Putusan Nomor Perkara: 210/Pid.B/2015/PN.Skt dan  
Putusan Nomor Perkara: 64/Pid B/2016/PN.Wng)**

**Abstrak**

Perkara perzinahan atau yang dalam KUHP disebut dengan gendak (*overspel*), pada dasarnya masih banyak terjadi di Indonesia. Penanganan terhadap kasus perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah tergolong cukup sulit diungkap karena perlu adanya sebuah proses tangkap tangan sedang melakukan perzinahan. Disatu sisi peran dari Kepolisian Republik Indonesia sangatlah penting agar para pelaku zina dapat ditetapkan menjadi tersangka. Adapun hukum yang mengatur mengenai perzinahan, saat ini hanya diatur dalam KUHP peninggalan kolonial yang sifatnya masih bertentangan dengan kultur masyarakat di Indonesia. Dalam KUHP perlu adanya sebuah persyaratan mutlak terhadap unsur perzinahan, yakni dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Jadi bagi laki-laki atau perempuan yang belum terikat status pernikahan, tidak bisa dengan mudah di dakwa melakukan tindak pidana perzinahan. Dengan demikian perlu sebuah sistem hukum yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat pernikahan, agar dapat mengurangi angka perzinahan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Delik Aduan, Tindak Pidana, Pernikahan, Zina.

**Abstract**

*The matter of adultery or in the Indonesian criminal code called 'gendak' (overspel), essentially still a lot going on in Indonesia. The handling of the case against adultery committed by men as well as women who are married are categorized as hard enough revealed the existence of a need to because the capture process hands are committing adultery. On one side of the role of the police force of the Republic of Indonesia is very important so that the perpetrators of adultery can be set to be a suspect. As for the laws governing adultery, currently only provided for in the Indonesia Criminal Code of a colonial nature is still at odds with the culture of the community in Indonesia. On the Indonesian criminal code is need for an absolutly requirement against adultery, which is done by people who are already married. So for male or female who has not yet been tied to marital status, can not easily on claims by doing the crime of adultery. Thus need a legal system that can uphold the dignity and the dignity of marriage, in order to reduce the number of adultery in Indonesia.*

**Keywords:** *Complaint of Delict, Criminal Act, Marriage, Adultery.*

**1. PENDAHULUAN**

Dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga, perselisihan merupakan hal yang wajar terjadi. Baik itu cekcok, saling mendiamkan, pisah ranjang,

perselingkuhan, bahkan yang paling parah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Banyaknya pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang ataupun dilakukan secara tergesa-gesa, akhirnya menimbulkan sebuah masalah baru ketika seorang pasangan sudah menjalani hidup rumah tangga. Banyak diantara pasangan yang sudah hidup bersama bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun, ada juga yang tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangganya dikarenakan banyak faktor.

Didalam hukum acara, selingkuhan itu biasa disebut dengan Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL), tergantung dari siapa yang melakukan perselingkuhan. Kategori dan penafsiran perselingkuhan itu sendiri pada hakikatnya masih bersifat umum dan luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya yang telah diterjemahkan; perzinahan itu sendiri sering disebut juga dengan gendak (*overspel*). Moeljatno dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil terjemahannya, juga menggunakan kata lain yakni diantaranya mukah.<sup>1</sup>

Dari uraian singkat di atas maka dengan ini penulis akan memilih judul penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni sebagai berikut; FUNGSI DELIK ADUAN DALAM PENANGANAN PERKARA GENDAK ATAU PERSELINGKUHAN YANG DISERTAI PERZINAHAN (Analisis Putusan Nomor Perkara: 210/Pid.B/2015/PN.Skt dan Putusan Nomor Perkara: 64/Pid B/2016/PN.Wng).

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini yakni agar dapat memberi pengetahuan mengenai permasalahan perzinahan. Manfaat lain yakni agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, bagi para pengajar atau tenaga pendidik, maupun mahasiswa itu sendiri, yakni untuk mengimplementasikan ilmu hukum pidana dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yakni perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat status pernikahan.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan ke 20)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 104.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah, dimana pengetahuan dan pengertian peneliti masih dangkal terhadap masalah yang itu.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji bahan hukum yakni Putusan, maka jenis penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang digunakan untuk mendekati masalah ditinjau dari aspek perundang-undangan.<sup>3</sup>

Dalam hal ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data literatur atau kepustakaan (*library research*) yaitu peneilitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan sekunder.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yakni metode kuantitatif metode yang memusatkan perhatian pada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. dalam pendekatan ini, variabel di analisis dengan teori yang obyektif.<sup>5</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1.1 Fungsi dan Tujuan Diaturnya Pasal Tentang Perzinahan Dalam KUHP

Melihat kedudukan tindak pidana perzinahan di Indonesia, akan di dapati sejarah panjang dalam penyusunan Pasal 284 KUHP di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hinda Belanda. Kedudukan KUHP yang merupakan produk kolonial Kerajaan Belanda, jika dikaitkan dengan kultur dan budaya Indonesia sekarang ini sangatlah bertolak belakang, karena kondisi kultur Indonesia saat ini sangat menjunjung tinggi norma kehidupan dalam beragama dan bermasyarakat.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 130.

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 41.

<sup>5</sup> Burhan Anshofa, 1996, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 20.

Jika melihat unsur perzinahan menurut J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, suatu tindak pidana perzinahan haruslah memuat unsur berikut:

- 1) Persetubuhan hanya dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat di kualifikasikan sebagai *overspel*, hal ini berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk didalamnya;
- 2) Pasangan yang di setubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Dengan demikian apabila pasangan yang disetubuhi telah menikah juga, pasangannya tersebut dianggap bukan sebagai peserta melainkan sebagai pelaku;
- 3) Persetubuhan tidak diizinkan oleh suami ataupun istri yang bersangkutan. Dengan demikian maka tidak dapat dikatakan *overspel*, jika persetubuhan itu diresui oleh suami atau istri yang bersangkutan, maka itu bukan termasuk *oversepel*.<sup>6</sup>

Menurut penjelasan dari Ahmad Bahiej terkait dengan delik zina; “Menurut pembentuk undang-undang, perzinahan hanya dapat terjadi karena ada pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Seperti disebut dalam *Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlanden* yang menyatakan bahwa perzinahan berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan”.<sup>7</sup> Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 26 KUHPerdara untuk golongan Eropa (*BW*), yang menyatakan bahwa ‘perjanjian perkawinan’ dianggap sebagai perjanjian perdata sebagaimana umumnya, dimana ‘perjanjian perkawinan’ itu berlaku sebagai undang-undang terhadap pihak-pihak yang terikat di dalamnya.

Dengan kata lain KUHP ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak suami atau istri yang merasa kehormatan dirinya telah tercemar, dapat menuntut pidana kepada pasangannya yang telah mengkhianati ikatan perkawinan mereka. Selain itu tujuan dibuatnya pasal mengenai perzinahan, semata-mata untuk menjaga harkat dan martabat pasangan yang sah dalam

---

<sup>6</sup> J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, hlm. 60.

<sup>7</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Hukum, hlm. 17, diakses dari: [www.docstoc.com/...Tinjauan-Yuridis\\_perzinahan-Dalam-Hukum-Pidana-Indonesia](http://www.docstoc.com/...Tinjauan-Yuridis_perzinahan-Dalam-Hukum-Pidana-Indonesia). pada tanggal 3 Juni 2018, pukul: 18.48 WIB.



perkawinan dari tindakan yang berpotensi mengganggu keutuhan rumah tangganya karena adanya pengkhianatan.

### 3.1.2 Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Suami ataupun istri yang pasangannya melakukan perzinahan dengan wanita atau pria lain, biasanya dalam kehidupan bermasyarakat akan cenderung menceraikan pasangannya yang telah berzinah dengan orang lain. Namun di sisi lain ada juga suami atau istri yang terlebih dahulu mengadukan pasangannya kepada perangkat desa dan kemudian diadukan kepada pihak kepolisian, walaupun pada akhirnya menjatuhkan talak ataupun mengajukan gugatan cerai akibat pasangannya berzinah.

Terhadap proses pengaduan kepada pihak kepolisian, seorang yang pasangannya melakukan perzinahan biasanya telah tertangkap basah terlebih dahulu dan mayoritas telah diamankan oleh pihak perangkat desa. Jadi dalam hal ini biasanya polisi akan menuju lokasi bila telah ada aduan dari perangkat desa. Hal yang dilakukan pihak kepolisian pada awalnya akan membawa para pelaku untuk dilakukan penyelidikan.

Menurut M. Yahya Harahap seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, yang dimaksud penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah; Setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. M. Yahya Harahap juga menegaskan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan”.<sup>8</sup>

Jika ditinjau dari fungsinya, M. Yahya Harahap menjelaskannya berdasarkan Pasal 5 KUHAP, yang di mana penyelidikan memiliki fungsi yaitu diantaranya: (1) Menerima pengaduan atau laporan; (2) Mencari keterangan

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid 1) Edisi II Cetakan ke 6*, Jakarta: Sinar Grafika: hlm. 103.

atau barang bukti; (3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai; dan (4) Melakukan tindakan lain menurut hukum.<sup>9</sup>

Menurut hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana, mengenai penyidikan pada dasarnya telah diatur dalam SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982. SK Kapolri tersebut menetapkan bahwa bukti permulaan yang cukup, yakni keterangan dan data yang di antaranya berupa: (1) Laporan Polisi; (2) Berita Acara Pemeriksaan Polisi; (3) Laporan hasil penyidikan; (4) Keterangan saksi/ahli; dan (5) Barang bukti.<sup>10</sup>

Setelah semua kewenangan kepolisian dan kejaksaan telah dijalankan sesuai tugas dan fungsi lembaga kejaksaan, selanjutnya berkas tersebut dilimpahkan ke Pengadilan beserta terdakwa dan barang bukti dari kepolisian. Selanjutnya setelah berkas dirasa sudah siap untuk di sidangkan dimuka umum, maka dilanjutkan dengan proses awal persidangan. Perlu diketahui dalam hal ini tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana yang persidangannya bersifat ‘terbuka untuk umum’, jadi siapapun dapat melihatnya. Kemudian untuk mempermudah dalam pengamatan dan pemahaman, dua buah putusan yang penulis uraikan dalam hal ini dibagi menjadi 2 poin pokok, yakni:

### 3.1.3 Perkara No: 210/Pid.B/2015/PN.Skt

#### Identitas Pihak (Terdakwa)

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rusminto Tjiptaning Fajar bin Cokro Sumarto                            |
| 2. Tempat lahir       | : Klaten   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun/28 Mei 1966   |
| 4. Jenis kelamin      | : laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Karangdowo, RT 002 RW 002, Desa Pugeran, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten; |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : PNS (Kesatuan Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro di Klaten)              |

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 104-106.

<sup>10</sup> Darwan Prinst dalam Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 16.

Kemudian dalam dakwaan pada Putusan **No: 210/Pid.B/2015/ PN.Skt**, JPU menjatuhkan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Perempuan bersuami yang melakukan perzinahan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam hal keterangan saksi JPU menghadirkan 5 orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah. Adapun penulis telah merangkum isi dari penuturan saksi yang dihadirkan oleh JPU pada saat persidangan yakni sebagai berikut:

Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang garis besarnya adalah:

1. Saksi SURAWAN (Saksi Pelapor), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai TNI di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro di Klaten sejak tahun 2005;
  - Bahwa benar, saksi yang mengadukan isteri saksi ke Polisi karena telah berbuat zina dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar, saksi tetap melanjutkan laporan karena isteri saksi telah berbuat zina dengan Terdakwa, .....
2. Saksi BELINDA CINDIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Hotel Kaloka beralamat di Jalan Gajah Mada No.77 Surakarta;
  - Bahwa saksi bekerja di Hotel Kaloka sudah 1 (satu) tahun;  
Bahwa saksi bekerja di Hotel Kaloka bagian Resepsionis yaitu bagian penerimaan tamu dan mencatat identitas tamu yang akan menyewa hotel, yang pada intinya saksi melihat keduanya benar telah melakukan check-in di kamar hotel dalam waktu kedatangan yang berbeda, .....

3. Saksi NUGROHO HANDOYO PUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 10.00 WIB melihat Terdakwa sedang chek in di loby Hotel Kaloka, tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang tamu berpakaian sipil mengaku TNI, mengendarai mobil warna silver langsung menanyakan dimana ada seorang tamu laki-laki bersama perempuan yang baru saja chek in dan tamu tersebut mengatakan bahwa yang baru saja masuk hotel adalah anggota TNI bersama isteri salah seorang tamu yang datang tersebut, .....
4. Saksi SLAMET WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di Hotel Kaloka sebagai Room Boy;
  - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 sekira jam 10.00 WIB saksi dipanggil Resepsionis yang bernama mbak Belinda yang menyuruh saksi untuk mengantarkan tamu masuk ke kamar No.20 Hotel Kaloka,
5. Saksi SRI WIYARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi pada tanggal 17 Agustus 2015 suami saksi (Rusminto Tjiptaning Fajar Bin Cokro Sumarto) piket dikantor, tetapi sampai malam tidak pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 WIB saksi ditelepon suami saksi dengan menggunakan HP milik Kaur Pam Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Lettu Sriyono bahwa saksi diminta datang ke Dodiklatpur Klaten dan sesampainya di Dodiklatpur, saksi diberitahu oleh Lettu Sriyono bahwa suami saksi telah melakukan perzinahan bersama dengan Edwi Rahayu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di kamar No.20 Hotel Kaloka Jalan Gajah Mada Kota Surakarta, ...

#### Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam nomor Polisi: AD-3516-PC, Nomor Rangka MH8CF48CA9J363150, Nomor Mesin: F484ID 363745, dan STNK atas nama: Rusminto Tjiptaning Fajar, alamat: Pugeran RT 001/RW 004 Pugeran Karangdowo Klaten.
- b. 1 (satu) hem lengan panjang warna abu abu.
- c. 1 (satu) celana panjang warna coklat.
- d. 1 (satu) jaket kulit warna coklat.
- e. 1 (satu) buku nikah suami milik Sdr. Rusminto Tjiptaning Fajar bin Cokro Sumarto, nomor kutipan akta nikah: 243/8/X/1990 tanggal 9 Oktober 1990.

## Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusminto Tjiptaning Fajar Bin Cokro Sumarto bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-41/SKRTA/Ep.2/11/2015 tanggal 12 Nopember 2015;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa “Pidana bersyarat selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan”.

Selanjutnya penulis akan mnguraikan putusan yang kedua yaitu Putusan

## Pemidanaan dalam Perkara

### 3.1.4 Perkara No: 64/Pid B/2016/PN.Wng.

#### Identitas Pihak (Terdakwa)

1. Nama lengkap : Sriyanti alias Sisri Binti (alm) Sukatno
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/17 November 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dawe RT 04 RW 06,  
Ds. Watuagung, Kec. Baturetno,  
Kab. Wonogiri, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

#### Dakwaan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 284 Ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria telah menikah.
2. Yang melakukan zina.

#### Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa yang merupakan istri sah Saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki yang bernama Khoirudin Mustofa;
  - Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 23.30.Wib di Hotel KenDedes yang beralamat di Dusun Jeruk Desa Tobukarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, .....
2. KRISTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi dan istri dari Saksi Wahudi;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki yang bernama Khoirudin Mustofa;
  - Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 23.30.Wib di Hotel Ken Dedes yang beralamat di Dusun Jeruk Desa Tobukarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, .....
3. KHOIRUDIN MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah menjalin hubungan khusus dengan terdakwa sejak tahun 1998;
  - Bahwa pertama kali saksi dan terdakwa melakukan hubungan suami istri pada tahun 1998 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa, waktu itu hubungan suami istri kami lakukan di kamar terdakwa, sementara suami Terdakwa tidak berada di rumah karena bekerja di pembakaran batu gamping;
  - Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi saat itu diketahui oleh saksi Wahudi, dan saksi Wahudi sempat marah;

#### Keterangan Terdakwa

- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Khoirudin telah diamankan Polisi pada Hari Kamis, tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 23.30.Wib di Hotel Kendedes yang beralamat di Dusun Jeruk Desa Tobukarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri karena melakukan perzinahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Khoirudin sudah menjalin hubungan khusus sejak tahun 1998;
- Bahwa pertama kali terdakwa dan saksi Khoirudin melakukan hubungan suami istri pada tahun 1998 untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa, waktu itu hubungan suami istri kami lakukan di kamar, .....

Barang Bukti Putusan No: 64/Pid B/2016/Pn.Wng

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) potong kaos lengan  $\frac{3}{4}$  warna coklat list hitam dengan motif gambar kucing;
- b. 1 (satu) potong celana dalam warna pink polos;
- c. 1 (satu) potong BH warna hitam border bunga warna pink;
- d. 1 (satu) potong celana jeans  $\frac{7}{8}$  warna biru;
- e. 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah hitam;
- f. 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio 125 warna merah No Pol AD 3692 YI beserta STNK;
- g. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu abu bertuliskan HB;
- h. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- i. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam putih bergaris hitam;
- j. 1 (satu) unit HP Nokia N99 warna hitam silver.

#### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sriyanti alias Sisri Binti (alm) Sukatno, bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan yang dilakukan secara berlanjut” dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sriyanti alias Sisri Binti (alm) Sukatno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

### 3.2 Pembahasan

#### 3.2.1 Sistematika Yang Diterapkan Oleh Hakim Dalam Menyusun Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Perzinahan Dalam Putusan Pemidanaan

Dalam KUHAP Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dijelaskan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Rusli Muhammad, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, ada dua jenis pertimbangan hukum dalam sebuah putusan yakni sebagai berikut:

##### 1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dibuat di dalam putusan.

## 2. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis

Hal-hal yang dimaksud didalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis antara lain yaitu: (1) Latar belakang terdakwa; (2) Akibat perbuatan terdakwa; (3) Kondisi terdakwa; dan (4) Agama terdakwa.

Menurut Usman yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, pentingnya pertimbangan hakim ini antara lain untuk melihat dari sudut kemanfaatannya juga apabila putusan telah dijatuhkan. Menurutnya:

“Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa, hakim-hakim di sini bahkan diseluruh Indonesia, mayoritas akan selalu berpedoman kepada hukum positif dan progresif. Walaupun keduanya pasti tidaklah bisa seimbang karena itu masuk dalam karakter masing-masing hakim. Makanya kami selalu menambahi kemanfaatan sosial juga untuk menyeimbangkan antara hukum positif dan progresif”.<sup>11</sup>

### Pertimbangan Hakim

#### 1) Dalam Putusan No: 210/Pid.B/ 2015/PN.Skt

##### a. Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa seorang ayah dan sekaligus selaku PNS telah menciderai keluarga dan korp Pegawai Negeri;

##### b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan mengakui kesalahannya serta menunjukkan rasa penyesalannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 284 Ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### 2) Dalam Putusan No: 64/Pid B/2016/PN.Wng

##### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, bahkan menyatakan akan menikah dengan saksi Khoirudin Mustofa.

##### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

---

<sup>11</sup> Usman, S.H., M.H., Hakim Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Di Surakarta, Pada Tanggal 2 Juni 2018, Pukul 10.20 WIB.



### 3.2.2 Dasar Hukum Yang Dipergunakan Hakim Dalam Menyusun Amar Putusan dan Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Dalam Perkara Perzinahan

Menurut Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjelaskan bahwa “Putusan Hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa”.<sup>12</sup>

Kemudian menurut Barda Nawawi Arif, dalam mengambil sebuah keputusan dalam sidang pengadilan, hakim harus melihat berbagai macam aspek diantaranya:

- a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana;
- c. Cara Melakukan Tindak Pidana;
- d. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana;
- e. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi;
- f. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana;
- g. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku;
- h. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku.<sup>13</sup>

Adapun menurut M. Yahya Harahap yang di dasarkan dari KUHAP, ia menjelaskan jenis putusan pidana sebagai berikut:

#### 1) Putusan Bebas (*Vrij Spraak*)

Di dalam KUHAP, Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Menurutny, putusan bebas dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila dari hasil persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, ‘tidak terbukti secara sah dan meyakinkan’.

#### 2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*Onslag van Recht Vervolging*)

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan ini yakni termuat dalam Pasal 192 ayat (2) KUHAP. Menurutny, “Putusan lepas dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

---

<sup>12</sup> Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H., *Teknik Pembuatan Putusan*, Disampaikan sebagai bahan diskusi pembinaan hakim Tanggal 17 Mei 2013 di 6 Askor.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.<sup>14</sup>

3) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan pada dasarnya telah termuat dalam Pasal 193 KUHAP. Menurutnya, dalam hal ini menjelaskan mengenai putusan pemidanaan yakni: “Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP”.

Putusan Pemidanaan

1) Putusan Pemidanaan No: 210/Pid.B/ 2015/PN.Skt

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Rusminto Tjiptaning Fajar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Spin warna hitam Nomor Polisi: AD-3516-PC, Nomor Rangka MH8CF48CA9J363150, Nomor Mesin: F484ID363745, dan STNK atas nama Rusminto Tjiptaning Fajar alamat: Pugeran RT.01/RW.04 Pugeran Karangdowo, Klaten;
  - 1 (satu) hem lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) jaket kulit warna coklat;
  - 1 (satu) buku nikah suami milik Sdr. Rusminto Tjiptaning Fajar Bin Cokro Sumarto Nomor Kutipan Akta Nikah: 243/8/X/1990 tanggal 9 Oktober 1990 dan dikembalikan kepada Terdakwa Rusminto Tjiptaning Fajar Bin Cokro Sumarto;
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Kemudian dapat diamati di atas, bahwasanya hakim menjatuhkan putusan Pemidanaan ‘8 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun’ yang harus dijalani. Putusan tersebut 1 bulan lebih ringan dari yang dituntut JPU

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 352.

yakni selama 9 bulan penjara atau bisa disebut JPU telah menuntut pidana maksimum dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

2) Putusan Pemidanaan No: 64/Pid B/2016/PN.Wng  
Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Sriyanti alias Sisri Binti (alm) Sukatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina yang dilakukan secara berlanjut”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan  $\frac{3}{4}$  warna coklat list hitam dengan motif gambar kucing;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink polos;
  - 1 (satu) potong BH warna hitam border bunga warna pink;
  - 1 (satu) potong celana jeans  $\frac{7}{8}$  warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah hitam;
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio 125 warna merah No Pol AD 3692 YI beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa Sriyanti alias Sisri Binti (alm) Sukatno;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan HB;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam putih bergaris hitam;
  - 1 (satu) unit HP Nokia N99 warna hitam silver, dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khoirudin Mustofa alias Udin Bin Muh. Syaibani;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menurut Usman, selaku hakim pidana di PN Kelas 1A Khusus Surakarta, ia mengatakan bahwa:

“Ancaman pidana terhadap kasus perzinahan memang maksimal 9 bulan. Apabila hakim memberikan putusan dengan masa percobaan, berarti hakim berharap kepada terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dan mau berubah, dengan catatan apabila dalam kurun waktu 1 tahun ia mengulangi kesalahan yang sama, kekuatan hukum secara eksekutorial langsung berlaku. Jadi apabila tertangkap tangan lagi dalam kasus perzinahan, tidak perlu sampai persidangan tapi dapat langsung di penjarakan”.<sup>15</sup>

Jika diuraikan kembali dari proses dakwaan, pembuktian, penuntutan, dan putusan, terdakwa dalam Putusan Pemidanaan No: 210/Pid.B/2015/PN.Skt

---

<sup>15</sup> Usman, S.H., M.H., Hakim Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Di Surakarta, Pada Tanggal 2 Juni 2018, Pukul 10.35 WIB.

menyesali perbuatannya dan bersikap ramah. Sedangkan dalam Putusan Pemidanaan No: 64/Pid B/2016/PN.Wng, majelis hakim tidak memberikan pidana bersyarat, hal ini dikarenakan terdakwa yang sudah terbukti bersalah justru kurang merasa bersalah dan masih ada niatan untuk melanjutkan hubungan dengan pasangan perzinahannya untuk melanjutkan hingga pernikahan, padahal diketahui bahwasanya masing-masing pihak telah berkeluarga dan memiliki anak.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, pada dasarnya pengaturan mengenai delik perzinahan bertujuan untuk menjaga harkat serta martabat pasangan suami isteri yang telah membentuk hubungan perkawinan, dan menjunjung tinggi norma dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

*Kedua*, dalam regulasi hukum positif di Indonesia, peran dan kedudukan hukum sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan setiap perkara perzinahan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, mayoritas selalu berujung pada putusan pemidanaan dari pengadilan dan tidak diselesaikan dengan perdamaian di kepolisian.

*Ketiga*, dalam penyusunan pertimbangan hukum oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim selalu mengedepankan nilai-nilai kepatutan dan menjunjung tinggi keadilan. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas putusan pemidanaan tentang perzinahan, berakhir dengan dijatuhinya pidana penjara kepada terdakwa, walaupun ada beberapa yang masih menerapkan sistem percobaan.

*Keempat*, dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan implementasi dari KUHP dan KUHP. Hakim dalam hal ini juga mengedepankan sudut pandang hukum progresif, dimana kemanfaatan hukum selalu ditinjalkan daripada hanya sekedar memberikan balasan sesuai dengan teori pembalasan dalam hukum pidana. Hal ini bertujuan agar para pelaku dapat menyesali dan memperbaiki dirinya di kemudian hari.

## 4.2 Saran

*Pertama*, lebih baiknya dalam hal fungsi dan tujuan hukum pidana terhadap delik perzinahan, harus diperluas lagi mengenai definisi perzinahan yang tidak hanya dibatasi dengan adanya hubungan pernikahan. Akan tetapi bagi siapa saja yang melakukan perzinahan baik yang sudah menikah maupun belum menikah, agar dapat di jatuhi hukuman pidana guna melindungi harga diri, harkat, serta martabat seseorang.

*Kedua*, dalam hal prosedur mengenai perkara perzinahan, alangkah baiknya tetap harus dibawa hingga ranah peradilan, dan tidak ada mediasi di tingkat kepolisian. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku dan juga masyarakat agar tidak melakukan perzinahan diluar pernikahan maupun yang sudah menikah.

*Ketiga*, kepada majelis hakim dalam menyusun pertimbangan hukum, alangkah baiknya lebih menguraikan secara detail mengenai apa saja hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang tidak memiliki *basic* hukum, dapat menyerap pertimbangan tersebut dengan jelas, jadi tidak hanya garis besarnya saja.

*Keempat*, dalam menyusun amar putusan, dasar hukum dari doktrin pakar pidana maupun yurisprudensi (jika ada), alangkah baiknya juga turut dijelaskan dalam putusan agar masyarakat dapat mempelajari putusan pemidanaan tersebut dengan lebih jelas dan terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshofa, Burhan, 1996, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arief, Nawawi. Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Harahap, M. Yahya, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid 1) Edisi II Cetakan ke 6*, Jakarta

Marzuki, Peter. Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan ke 20)*, Jakarta: Bumi Aksara

Prinst, Darwan, dalam Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Sahetapy, J. E., dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali

### **Makalah Seminar**

Suyuthi, Wildan, *Teknik Pembuatan Putusan*, Disampaikan sebagai bahan diskusi pembinaan hakim Tanggal 17 Mei 2013 di 6 Askor.

### **Internet**

Bahiej, Ahmad, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Hukum, diakses dari: [www.docstoc.com/...Tinjauan-Yuridis\\_perzinahan-Dalam-Hukum-Pidana-Indonesia](http://www.docstoc.com/...Tinjauan-Yuridis_perzinahan-Dalam-Hukum-Pidana-Indonesia).